

Peran Good Governace dalam Program Inovasi Kampung Hijau di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ambar Teguh Sulistiyani
Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

Abstrak, Good governance merupakan semangat baru yang ditiupkan dalam birokrasi pemerintah. Berbagai upaya ditempuh untuk mewujudkan tata kelola yang baik sehingga terwujud sistem birokrasi professional, produktif dan inovatif. Kelembagaan pemerintah menjadi bidakan utama untuk mencapai kemuliaan penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi akan mudah dilakukan jika lembaga pemerintah memberikan ruang gerak yang memadai terhadap peran stakeholder lain dan masyarakat.

Pemerintah, stakeholder lain dan masyarakat hendaknya bersinergi untuk mengemban dan merealisasikan program inovasi di segala bidang. Kampung hijau merupakan salah satu bentuk inovasi permukiman yang harus didukung oleh berbagai peran aktor. Sedangkan untuk merajut hubungan antar pihak, dibutuhkan iklim birokrasi yang kondusif. Paper ini membahas tentang pengejawantahan peran good governance dalam fasilitasi program inovasi kampung hijau di DIY.

Hasil pengkajian terhadap data sekunder menunjukkan bahwa peran pemerintah good governace berada pada tataran regulasi, perencanaan, implementasi dan pendampingan. Namun demikian, peran tersebut sekedar bersifat formal, belum intensif. Peran good governance masyarakat adalah dalam bentuk partisipasi, yang dapat berjalan bagus di tiga kampung hijau. Namun, partisipasi masyarakat belum dapat meluas. Sedangkan peran swasta masih terbatas pada kepentingan timbal balik yang dapat menguntungkan. Rekomendasi untuk mengoptimalkan good governace adalah dengan autentisitas birokrasi hijau (authentic green bureaucracy), program aksi hijau oleh swasta (private green action) dan rekayasa sosial komunitas hijau (social engineering green community).

Kata Kunci :

Abstract, Good governance is a new spirit delivered for government bureaucracy. Various efforts have been made in order to create good governance so that it can lead to professional, productive, and innovative bureaucracy system. Government institutional

becomes the main ditch to achieve respectable governance. Innovation will be convenient if government institutions give adequate spaces toward the roles of other stakeholders and community.

Government, other stakeholder and community are supposed to work together to carry and implement innovation programs in all sectors. Green village is one residential innovation form that should be supported by various actor roles. In addition, in order to establish relationship between parties, conducive of bureaucracy atmosphere is needed. This paper discusses the implementation of the roles of good governance in facilitating green village innovation program in Daerah Istimewa Yogyakarta.

Investigation result toward secondary data show that the government role of good governance is on regulation, planning, implementation and assistance. However, the role is only formal not yet intensive. Good governance role of society is in the form of participation, which has worked well in three green villages. However, society participation is not wide spread yet. Meanwhile, private role is still limited on mutual interest which is profitable. Recommendation to optimize good governance by performing authentic green bureaucracy, private green action and social engineering green community.

Keywords :

PENDAHULUAN

Pembangunan kampung hijau merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam menghadapi masalah global warming. Kebutuhan pembangunan yang tidak dapat ditolak juga telah menyebabkan degradasi lingkungan hutan. Pembukaan lahan yang berlebihan semakin meluas untuk kepentingan pengembangan areal persawahan, hutan produksi, pusat-pusat kota, fasilitas publik dan permukiman. Makin menyempitnya hutan dan ruang terbuka hijau menyebabkan kemampuan untuk menetralsir karbon semakin kecil.

Kondisi lingkungan permukiman mengalami permasalahan serius. Pemanasan global terjadi akibat dari gas rumah kaca, emisi gas buang, dan cerobong pabrik, yang secara umum menggunakan bahan bakar fosil fuel. Peningkatan pencemaran udara menjadi isu besar di seluruh dunia. Terdapat 10 kota dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia, yaitu New Delhi, Patna, Gwalior, Raipur, Karachi, Peshawar, Rawalpindi, Khorramabad, Ahmedabad dan Lucknow. Sedangkan di negara berpendapatan rendah, terdapat 90% kematian akibat polusi udara (Lukman.

2016). Meskipun Indonesia tidak termasuk pada 10 negara dengan polutan tertinggi di dunia, namun hal ini tetap perlu mendapat perhatian. *Environmental pollution in Indonesia has reached the stage of worrying* (Aminah dan Novianti. 2014.h.1).

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik DIY dalam kurun waktu 3 tahun saja, terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup di DIY hingga di atas 250 persen (Laporan BPS.2015/2016). Untuk itu, diperlukan peran *good governance* dalam inovasi program kampung hijau. Beberapa kasus *governance* dalam pembangunan kampung hijau terjadi di kota Madiun, kota Makasar dan kota Jakarta. Seperti diungkapkan oleh Putri et.al (2015.h.50), upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030. Di Kota Makasar, menurut Tahir dan Nasruddin (2017.h.13), kapabilitas *dynamic governance* yang ditunjukkan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh dengan adanya antisipasi RTH melalui kebijakan. Namun, opsi strategi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun

dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok bangunan. Selain itu, strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH. Di Jakarta, menurut Manan (2015.h.478), *good governance in the management of green areas should be established*. Beberapa penelitian ini menunjukkan aspek penting *governance* dalam pembangunan ruang hijau. Bertolak dari kondisi ini maka DIY yang telah mengembangkan *good governance* perlu dilihat dari beberapa kasus di DIY perlu memperhatikan aspek pencemaran dan degradasi lingkungan secara umum. Pencemaran air juga terjadi secara meluas. Menurut Herlambang (2006.h.17), pencemaran air dapat dilihat dari kekeruhannya. Kondisi air yang keruh dimungkinkan diakibatkan oleh pencemaran akibat limbah pertambangan, limbah industri, limbah kegiatan domestik, akibat guguran pertikel tanah karena longsor, erosi dan juga banjir. Bukan hanya pencemaran air, namun cadangan air tanah yang selalu mengalami penurunan juga merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Akibat pembangunan hotel yang masif di DIY, maka air tanah mengalami penurunan yang serius.

Masalah tutupan lahan bukan hanya dihadapi di wilayah perkotaan, namun juga

dialami di pedesaan. Alih fungsi lahan di DIY mencapai 200-250 ha/tahun (Kepala Dinas Pertanian Pemda DIY. (16 Oktober 2017). Kondisi ini sangat menentukan penurunan kualitas lingkungan hidup. Alih fungsi lahan yang terjadi di DIY merupakan akibat akan adanya pembangunan perumahan. Trend investasi perumahan telah menjadi pemicu pesatnya alih guna lahan DIY.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan penurunan kualitas lingkungan ini, maka pemerintah DIY melakukan inovasi kampung hijau. Program kampung hijau sebenarnya merupakan program nasional yang berusaha untuk menginovasi permukiman di Indonesia. Standar kualitas lingkungan perlu dibentuk lagi, khususnya di wilayah yang menghadapi permasalahan pencemaran lingkungan. Dengan program ini, diharapkan dapat secara bertahap memfasilitasi pemulihan kondisi lingkungan permukiman.

Dalam upaya inovasi kampung hijau untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini peran stakeholder diperlukan secara intensif. Stakeholders yang dimaksud di sini adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Pengembangan good governance dalam inovasi kampung hijau sangat diperlukan. Peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor bersifat strategis. Sementara itu, peran perguruan tinggi secara umum adalah

sebagai inisiator dan fasilitator rekayasa sosial maupun rekayasa teknologi, peran swasta adalah sebagai fasilitator dan kontributor, sedangkan operasionalisasi secara teknis dilakukan oleh masyarakat.

Dalam praktiknya, pemerintah, khususnya Badan Lingkungan Hidup, telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, baik di level Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu, keterlibatan perguruan tinggi melalui berbagai program telah memberikan kontribusi yang serius terhadap pembangunan kampung hijau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kuliah Kerja Nyata (KKN), pendampingan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian tindakan dilakukan untuk memberikan peningkatan kondisi lingkungan fisik dan sosial masyarakat. Bahkan kesadaran swasta telah bermanfaat terhadap percepatan pembangunan kampung hijau.

Keterkaitan antar stakeholder dalam pembangunan kampung hijau merupakan indikasi adanya praktik good governance. Paper ini mengetengahkan permasalahan “Bagaimanakah peran good governance dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan kampung hijau di DIY?”

KERANGKA TEORI

Kampung Hijau sebagai Rehabilitasi Pencemaran Lingkungan

Seluruh logam berat muncul secara alami di lingkungan yang dihasilkan dari buangan industri dengan jumlah yang makin hari makin meningkat. Semakin modern suatu negara, semakin besar potensi menuju industrialisasi. Dengan banyaknya pabrik yang melakukan operasionalisasi produksi, semakin banyak polutan yang dikeluarkan dari cerobong asap maupun limbah cair dengan kontaminan tinggi. Jika sistem pengolahan limbah tidak memenuhi standar baku mutu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Polusi udara dan limbah padat maupun cair merupakan sumber pencemar lingkungan yang besar dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Berdasarkan pendapat dari Kovacs (1992), manusia bukan hanya menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, tetapi juga mengasup makanan yang tercemar logam berat (Istarani.et.al. 2014.h.53).

Dengan mempertimbangkan semakin besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan, maka diperlukan kewaspadaan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Terdapat tiga indikator penting yang perlu dikembangkan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup. Tiga indikator tersebut adalah indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan (Pusat Data dan Informarmasi

Kementerian LH dan Kehutanan.2015.p.i). Penurunan kualitas air terjadi jika air terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang berasal dari limbah, yang secara umum mengandung logam berat. Pencemaran udara, baik karena emisi karbon maupun karbon monoksida, telah mengancam kualitas udara. Sedangkan pembukaan lahan dan alih fungsi yang berlebihan telah mengancam keseimbangan ekosistem sehingga memunculkan berbagai masalah kesehatan dan bencana.

Di wilayah yang tercemar perlu dilakukan upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan. Dilihat dari pendekatan kuratif, pembangunan kampung hijau merupakan usaha untuk merehabilitasi kondisi lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kondisi memerlukan sarana dan prasana rehabilitasi kondisi lingkungan. Penyediaan selokan atau drainasi, biovory, dan sumur resapan berguna untuk menanggulangi genangan air hujan dan banjir di lingkungan permukiman. Salah satu program kampung hijau adalah mengatasi masalah luapan air di lingkungan permukiman secara mandiri dan swakelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ikhtiar (2016.h.22) menyampaikan, apabila air hujan tidak tertampung oleh selokan-selokan rumah, maka dapat dialirkan ke sumur-sumur resapan.

Kampung hijau merupakan sebuah hunian yang dilingkupi oleh pemenuhan manajemen lingkungan. Menurut Leslan et.al. (2010.h. 6548), green space in urban neighborhoods can be a serious restriction for the wellbeing. Sebuah kampung hijau memiliki ciri khas sebagai permukiman hijau yang berkelanjutan yang dapat melakukan manajemen lingkungan secara mandiri dan dapat menghemat penggunaan energi. Beberapa aspek yang dikembangkan dalam kampung hijau menurut Budihardjo (1999) adalah persampahan, pengelolaan air bersih, pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan dan inovasi-inovasi lain yang berkelanjutan. Bertolak dari pendapat ini, maka sebuah kampung hijau memiliki sistem pengendalian lingkungan yang dilakukan melalui dukungan masyarakat serta bantuan dari stakeholder lain dan pemerintah. Pendapat senada disampaikan oleh Nugroho dan Syaodih (t.th.h.1) akan diperlukannya prinsip-prinsip Peningkatan Atribut Green City dari setiap elemen atribut kota hijau (green open space, green transportation, green community, dan green waste). Berdasarkan pendapat ini, maka sebuah kampung hijau hendaknya memiliki ruang terbuka hijau, transportasi dengan bahan bakar ramah lingkungan, dukungan dari komunitas hijau serta pengelolaan sampah. Terdapat kemiripan

pendapat antara Budihardjo dengan Nugroho dan Syaodih.

Pengelolaan sampah merupakan ciri utama terdepan yang perlu dikembangkan secara meluas. Pengelolaan sampah dapat dimulai dari pemahaman konsep manajemen sampah yang terdiri atas 5 R (Replace, reduce, Reuse, Recycle, Recovery), implementasinya hingga program aksi. Transformasi pengetahuan dan ketrampilan adalah langkah terdahulu yang penting dilakukan. Masyarakat yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen sampah, harus memiliki kesadaran dan kesanggupan untuk mengimplementasikannya. Apabila kesadaran dan kesanggupan untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3 R atau 5 R telah ada, maka misi dari sebuah kampung hijau yang berkelanjutan mulai bertumbuh.

Air bersih dewasa ini semakin langka akibat limbah industri yang terkontaminasi dengan bermacam-macam bahan kimia telah semakin meluas. Keprihatinan masyarakat dalam memulihkan dan memurnikan air sangat diperlukan. Gerakan kampung hijau berusaha menjangkau layanan pengelolaan air bersih dan air minum. Air yang terkena kontaminan sebaiknya mendapatkan treatment berupa penyaringan (filtrasi). Air "sadah" yakni air yang mengandung mineral

yang tinggi, umumnya partikel tanah, ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat perlu mendapatkan treatment. Air kotor tidak hanya bersifat sadah, namun juga terkontaminasi, sehingga harus ditreatment. Susanto et.al. (2014. h. 142) menyatakan bahwa air kotor ini tidak dapat digunakan secara langsung apalagi untuk dikonsumsi.

Aktivitas kampung hijau salah satunya adalah melakukan treatment terhadap air, jika di lingkungannya mengkonsumsi air bersih yang terkontaminasi. Yang disebut air bersih berbeda dengan air sehat. Air yang digunakan untuk konsumsi hendaknya merupakan air sehat. Gerakan kampung hijau antara lain perlu memahami dan melakukan pengambilan sampel air, pemeriksaan laboratorium, dan pengadaan alat teknologi tepat guna untuk penyaringan. Realisasi kegiatan treatment terhadap air ini dapat berlangsung pada setiap rumah tangga maupun dalam komunitas.

Pengendalian terhadap banjir dilakukan dengan membuat drainase dan resapan-resapan air yang memadai. Drainase dan resapan air dapat berbasis pada lingkungan maupun rumah tangga, namun diupayakan tersedia sumur resapan. Sumur resapan berfungsi ganda, selain sebagai pengedali banjir juga mampu

mengembalikan air menjadi dalam air tanah kembali. Menurut hasil penelitian Bisri dan Prasetya (2009.h.90), sumur resapan ini adalah solusi tercepat untuk konservasi air tanah. Bertolak dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dipahami bahwa semakin banyak air yang terserap dalam resapan, maka akan semakin baik pula kemampuannya untuk memperbaiki muka air tanah. Dengan begitu, sumber air di lingkungannya tidak cepat kering. Di samping itu, genangan-genangan air sisi dari hujan juga perlu diatasi, agar tidak menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Untuk itu, biovory dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam kampung hijau.

Pengelolaan terhadap lingkungan secara umum adalah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara proprosi bangunan dan tutupan lahan dengan mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH). Menurut Wolch (2014.h.234), green space, such as parks, forests, green roofs, streams, and community gardens, provides critical ecosystem services. Green space also promotes physical activity, psychological well-being, and the general public health of urban residents. Sangat ideal jika dalam suatu permukiman tersedia 30% RTH. Jika itu sulit diwujudkan, maka setidaknya ada 10% RTH dalam suatu kawasan. Vegetasi yang ditanam sebagai penghijauan juga

menjadi sarana konservasi lingkungan dan sebagai upaya memperindah pemandangan. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan ini tidak terbatas pada penanaman pohon, namun juga penataan dan keserasian. Mengingat kampung hijau memiliki luas wilayah yang terbatas, maka RTH ini dapat berupa taman, kebun, halaman, dan lahan antar rumah yang ditanami vegetasi.

Sesungguhnya bentuk kampung hijau itu sendiri merupakan sebuah inovasi lingkungan. Inovasi dalam membuat suatu permukiman yang memiliki keterbatasan fisik, tercemar dan gersang menjadi sebuah permukiman hijau yang terbebas dari pengaruh polusi dan bersih. Untuk melakukan perubahan ini diperlukan inovasi-inovasi. Tata cara membangun lingkungan yang lebih baik dan menemukan serta menggunakan teknologi tepat guna adalah serangkaian inovasi. Pada level masyarakat, pemerintah maupun dunia pendidikan, sesungguhnya sudah banyak ditemukan teknologi terkait dengan rekayasa sosial dan teknologi untuk lingkungan. Beberapa contohnya adalah teknik pengolahan pupuk, bahan anorganik, limbah rumah tangga, teknik biovory dan sumur resapan.

Indikator kampung hijau yang telah diuraikan ini mencakup komponen yang sangat luas dan sekaligus detail. Penelitian ini melacak data sekunder terkait dengan

indikator persampahan, pengelolaan air bersih, pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan dan inovasi-inovasi lain sebatas hal-hal yang dilakukan di DIY dan sudah terdokumentasikan sebagai data sekunder, baik yang diakses dari dokumen yang tersimpan di Pemda DIY, maupun data yang dapat diakses secara online.

Peran Good Governance dalam Inovasi Kampung Hijau

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang mampu melakukan swakelola lingkungan melalui program kampung hijau, maka peran good governance diperlukan. Disampaikan oleh Nugroho dan Syaodih (t.th.h.1), hal tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan pendapat masyarakat sebagai pendukung terciptanya kota hijau. Pendekatan dan aktivitas langsung dari stakeholder dalam menggerakkan kampung hijau ini dapat mengantarkan dan mengedukasi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lingkungan permukiman dan sekitarnya. Good governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara demokrasi (Nugrahaningsih dan Utami. 2014.h.3). Pemerintah melakukan proses terstruktur dalam menyampaikan program kampung

hijau, hingga masyarakat dapat memahami, sanggup, dan melakukan kegiatan yang mendorong terwujudnya suatu lingkungan permukiman yang memiliki ciri khas kampung hijau. Menurut Manan (2015.h.483), good governance systems have been applied in the planning of the expansion of green areas.

Guna mewujudkan inovasi kampung hijau diperlukan peran good governance secara utuh. Komponen-komponen good governance diharapkan dapat mengambil peran secara proporsional. Definisi peran menurut Slamet (1985.h.15) adalah sebagai "sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Susanto (1979.h.94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran governance dalam hal ini adalah mengembangkan kerjasama antar stakeholder, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, dalam mewujudkan kampung hijau. Sesuai pendapat Nicolaidou (2016.h.5), ...presenting alternative and multifunctional ways to manage and revitalise cities. Menurut Putri et.al. (2013.h.43), good governance juga dapat diterapkan sebagai aspek penunjang dalam penyelesaian masalah dan terciptanya

kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan pelimpahan kewenangan (Yenny.2013.h.197). Tjokroamidjojo memandang good governance sebagai "suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan. Menurut Woods (1999.h.4), partisipasi, akuntabilitas, terbuka dan bertanggung jawab merupakan prinsip utama dalam good governance. Sedangkan konsep good governance secara eksplisit merupakan suatu cara dan pelaksanaan governance yang baik, baik dalam arti tindakan atau perilaku para stakeholder dalam menjalankan governance dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip. Menurut Mahfud MD (2001.h.ii), good governance secara etimologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik. Sementara itu, Thoha (1999.h.2) menyampaikan bahwa good governance adalah tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Kampung hijau sangat tergantung dari kesadaran pemerintah sebagai perencana. Seperti disampaikan oleh Wolch (2014.h.241), it depends on the willingness

of planners and local stakeholders to design green space projects that are explicitly shaped by community concerns, needs, and desires rather than either conventional urban design formulae or ecological restoration approaches. Dalam hal ini, perencanaan sebaiknya disusun dengan matang, agar mudah untuk dilaksanakan. Pemerintah yang memiliki kesadaran tinggi akan arti pentingnya lingkungan hijau dan sehat, akan serius dalam menyusun rencana tersebut, baik dari rencana yang sifatnya umum maupun yang detail dan lengkap disusun. Panduan yang bersifat detail memudahkan implementor dan masyarakat untuk membangun kampung hijau. Ives et.al. (2014.h.6) menyampaikan bahwa green open space planning is generally based on local policies and guidelines and is rarely informed by empirical evidence. Apa yang disampaikan Ives merupakan potret fakta yang banyak terjadi. Seringkali pedoman pembangunan kampung hijau tidak tersedia dalam bentuk dokumen yang baik. Sebuah pedoman inovasi kampung hijau mestinya diformulasikan dan disahkan oleh pemerintah lokal, dengan menterjemahkan regulasi dari level pusat.

Kampung hijau sangat strategis untuk menginovasi kondisi permukiman yang dewasa ini telah mengalami degradasi lingkungan. Pemerintah tidak mungkin

optimal membangun kampung hijau apabila secara sepihak menginisiasi. Malek et.al. (2014.h.13) menyatakan bahwa secara keseluruhan kampung hijau tidak dapat mengabaikan peran kepuasan pengguna, preferensi, pola penggunaan dan kebutuhan. Untuk itulah stakeholder dan masyarakat perlu dilibatkan. Menurut Tahir dan Nasruddin (2017.h.1), penerapan citra good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara. Pemerintah membutuhkan peran lembaga lain yang dapat berkontribusi dalam program ini. Pemahaman tentang governance dalam konteks kebijakan kampung hijau hendaknya diarahkan tentang bentuk shareholders. Sesuai dengan pendapat Gardera et.a. (2014.p.1), pemahaman akan kualitas lingkungan hidup ini sangat penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bertolak dari pendapat ini, maka peran good governance dalam inovasi kampung hijau sangat penting dan strategis. Tanpa adanya pendekatan multistakeholders maka akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kampung hijau.

Inovasi program kampung hijau berjalan karena peran masing-masing aktor dapat berjalan dengan serasi dan saling

Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017 | 10

mengisi. Peran pemerintah dalam regulasi, inisiasi, motivasi, dan implementasi sangat mengemuka. Peran swasta bentuk kepeduliannya adalah berkontribusi untuk ~~terhadap~~ membangun lingkungan dalam bentuk CSR. Peran perguruan tinggi adalah mengedukasi masyarakat guna menyadarkan akan arti pentingnya kampung hijau untuk hidup yang berkualitas. Sedangkan peran masyarakat sendiri adalah dalam operasionalnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkepentingan untuk mempermudah masyarakat awam dan para pengambil keputusan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, untuk memahami kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Secara umum, penekanan peran good governance dalam inovasi program kampung hijau adalah pola tingkah laku pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melakukan pembangunan suatu kawasan hunian berbatas administrasi sebagai kampung. Hal tersebut dapat terwujud dengan melakukan manajemen sampah, treatment terhadap air, pengendalian banjir, pembuatan RTH dan inovasi-inovasi secara berkelanjutan. Pola tingkah laku pemerintah mencakup penentuan regulasi, perencanaan, pelaksanaan inovasi program kampung hijau. Pola tingkah laku swasta dalam memberikan kontribusi terhadap inovasi

program kampung hijau adalah dalam bentuk bantuan. Sedangkan pola tingkah laku masyarakat dalam inovasi kampung hijau adalah dalam bentuk partisipasi yang diberikan.

Analisis Peran Good Governance dalam Inovasi Program Kampung Hijau di DIY

Analisis peran peran good governance dalam inovasi program kampung hijau di DIY mencakup pola perilaku pemerintah, pola perilaku swasta dan pola perilaku masyarakat dalam melakukan inovasi kampung hijau di wilayahnya. Penjabaran analisis ini memberikan gambaran secara deskriptif kualitatif tentang kondisi peran good governance yang telah dilakukan di DIY.

Pola perilaku pemerintah dalam melaksanakan inovasi program kampung hijau ditumpukan pada kelembagaan yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokok. Adapun organisasi pemerintah yang sesuai tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH). Dalam rangka memudahkan pelaksanaan inovasi program kampung hijau, BLH tingkat provinsi bekerjasama dengan BLH di kabupaten dan kota. Secara konseptual, BLH Pemda DIY yang menyusun konsep dan panduan operasional, sedangkan BLH di kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul

dan kota Yogyakarta yang melakukan eksekusi secara operasional. Ini merupakan wujud perilaku good governance yang sesuai. Pola perilaku pemerintah dalam hal

ini adalah membuat jaringan kerjasama antara BLH Pemda DIY dengan BLH Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Tabel 1. Bentuk pola perilaku good governance pemerintah dalam Inovasi program kampung hijau

Pemerintah	Regulasi	Perencanaan	Implementasi
Pemda DIY	Pedoman Kampung hijau, 2007	Koordinator dalam perencanaan lomba	Penyelenggaraan lomba kampung hijau
Kab. Sleman	--	Penyusunan Program dan kegiatan	Melakukan inovasi kampung hijau, Pengiriman lomba 2015 Desa Kadirojo, Tempel Dusun Sukunan, Gamping
Kab. Bantul	--	Penyusunan Program dan kegiatan	Melakukan inovasi kampung hijau, Pengiriman lomba Dusun Serut Konsep “omong-omong, ameng-ameng, iming-iming”
Kab.Kulon Progo	--	Penyusunan Program dan kegiatan	Melakukan inovasi kampung hijau, Pengiriman lomba
Kab. Gunung Kidul	--	Penyusunan Program dan kegiatan	Melakukan inovasi kampung hijau, Pengiriman lomba
Kota Yogyakarta	--	Kampung hijau berbasis RW	2012: Semangat “segoro amarto” (Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta) Pengiriman lomba Tahun 2016 membangun 12 kampung hijau

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, DIY, 2017.

Di antara program yang dikembangkan oleh pemerintah DIY, tentunya ada yang mencapai target dengan baik. Pola perilaku good governance terkait dengan kampung hijau

yang dilakukan oleh BHL sangat tampak pada regulasi, sedangkan peran teknis sangat kecil porsinya. Sebagaimana fungsi provinsi sebagai koordinator, maka Pemda DIY merupakan koordinator dalam

penyelenggaraan perencanaan di kabupaten/kota. Konsolidasi rencana per kabupaten/kota dilakukan sekaligus dengan konsultasi kepada Pemda DIY. Peran implementasi hanya pada level lomba, sedikit pembinaan langsung, maupun peninjauan lapangan.

Level perencanaan di Pemda DIY berupa perencanaan penyelenggaraan lomba. Ajang kompetisi diciptakan untuk memberikan semangat kepada masyarakat dan pemkab/kota. Dengan adanya motivasi lomba, maka setiap kabupaten/kota menjadi lebih bersemangat dalam mengembangkan pola perilaku good governance, berupa pendampingan, perencanaan dan implementasi inovasi program kampung hijau. Pendampingan dilakukan oleh semua kabupaten/kota. Adanya semangat pendampingan yang dilakukan secara riil telah menghasilkan kontinuitas kegiatan di kampung hijau binaan masing-masing.

Pola perilaku pendampingan, sebagai wujud dari praktik good governance, menguat di tingkat kabupaten/kota. Pendampingan dilakukan untuk menjaga semangat pelaku kampung hijau agar tetap stagnan ataupun meningkat. Kabupaten dan kota yang melakukan pendampingan paling efektif adalah Bantul, Kota Yogyakarta dan

Sleman. Bentuk pendampingan adalah dengan melakukan kunjungan ke kampung hijau. Pada level implementasi, setiap kabupaten/kota sekuat tenaga mengoptimalkan hasil kerja sehingga terlihat produk keluarannya. Produknya adalah keberhasilan setiap kabupaten/kota mengantarkan kampung hijau masing-masing memenuhi indikator manajemen sampah, pengelolaan air, penanggulangan banjir, RTH, dan inovasi berkelanjutan. Upaya dalam implementasi inovasi program kampung hijau sebaiknya dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai kultural yang terkait dengan lingkungan. Selama ini yang terlihat memiliki semangat sosio kultural dan telah diekspose sebagai slogan yang menarik adalah kota Yogyakarta. Dengan konsep segoro amarto, maka masyarakat memiliki semangat untuk mewujudkan kampung hijau dengan lebih sungguh-sungguh.

Pada level implementasi, khususnya BLH Pemda DIY melaksanakan lomba kampung hijau. Setiap kabupaten dan kota membangun secara sungguh-sungguh agar memiliki kampung hijau yang layak untuk mengikuti lomba. Semua kabupaten dan kota melakukan pendampingan yang intensif terhadap kampung hijau yang akan dilombakan. Bentuk-bentuk perilaku good

governance yang dilakukan oleh pemerintah tersaji pada tabel 2.

Di Kota Yogyakarta, pada tahun 2015, telah memiliki 6 kampung hijau, sebagaimana dicantumkan pada tabel. Enam kampung hijau tersebut yang telah maju di tingkat provinsi. Sedangkan kampung Gambiran telah maju sebagai kampung iklim, pada tahun 2015. Semua pemerintah telah memberikan peran

pendampingan secara umum dengan proporsi dan variasi yang berbeda-beda. Sedangkan peran pada level perencanaan telah dilakukan oleh Pemda DIY. Sementara itu, perencanaan di kabupaten dan kota hanya pada level teknis operasional. Rencana yang dibuat di kabupaten dan kota hanyalah pada perencanaan program kampung hijau.

Tabel 2. Bentuk pola perilaku Good governance

Pemda	Pendampingan	Diklat	Bantuan alat	Bantuan tanaman	Lainnya
DIY					Pameran pembangunan
Sleman					Ikut serta dalam pameran
Bantul					Ikut serta dalam pameran
Kulon Progo					Ikut serta dalam pameran
Gunung Kidul					Ikut serta dalam pameran
Yogyakarta					Ikut serta dalam pameran

Perintisan kampung hijau dilakukan oleh Pemda DIY sejak tahun 2007, dengan melakukan penyusunan buku panduan kampung hijau. Buku tersebut memuat indikator kampung hijau dan pelaksanaan inovasi kampung hijau di kabupaten dan kota. Pada tataran regulasi, teknis operasional belum dibentuk sehingga turunan peraturan kampung hijau hanya

sampai di level Pemda DIY. Kabupaten dan kota di DIY hanya sebagai implementor yang secara teknis mendampingi komunitas maupun kampung atau desa. Pada data tabel 1, dapat dilihat bahwa pada level Pemda DIY telah mensosialisasikan pentingnya membangun kampung hijau dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri.

Bentuk bantuan yang diberikan selain hal-hal yang sifatnya edukasi, juga bantuan alat, teknologi, dan bantuan penghijauan. Beberapa bantuan tersebut adalah pendampingan dari BLH dan support tanaman perindang sebanyak 50-70 batang. Selain itu, juga akan diberikan alat pengolahan sampah (Kasubid Pengembangan Sumberdaya Lingkungan). Secara umum, pendampingan telah

dilakukan, namun tidak dapat secara intensif. Pendampingan lebih banyak dilakukan secara formal.

Untuk mengetahui peran masyarakat dalam membangun kampung hijau, dapat dilihat dari kontribusinya secara langsung atau tidak langsung. Inisiatif masyarakat dalam inovasi program kampung hijau melalui gerakan masyarakat dapat diidentifikasi dari data tabel berikut:

Tabel 3. Upaya membangun inovasi program kampung hijau

Pemda/Tahun	Tokoh	Alamat kampung hijau	Kegiatan	Inovasi	Sumber data
Sleman 2002-2008	Iswanto	Sukunan	Pengelolaan sampah mandiri, tanaman sayur organik, sumber air berkelanjutan, kerajinan sampah, pemanfaatan pekarangan, menghemat ebergi dan air, biovory	Mengelola air hujan untuk konsumsi Biogas Briket	Youtube
Bantul 2007	Tobadiyana (mantan dukuh)	Serut	Bank sampah, mitigasi bencana, RTH, pupuk organik, ketahanan pangan, saluran air, biovory, kolam ikan, tanaman konservasi, mina padi	Bahan plastic untuk kolam organik	Youtube
Kulon Progo		Kalirejo Kalibiru	RTH	--	Youtube
Gunung Kidul		Pampang, Bendowo	Bank sampah, RTH, kerajinan plastic, buah organik, ternak organik,	--	Youtube
1 April 2007, deklarasi “Kampung Hijau“	Agus Susanto	RW 08 Kampung Gambiran, Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta	Pengelolaan Sungai Gajah Wong, Pemetaan sungai, Mencari jejaring/komunitas sungai, Membangun kesadaran masyarakat tidak membuang sampah di sungai, Antisipasi bencana banjir, Pembuatan bronjong, Energi alternative, IPAL menjadi Biogas di RT. 30 & RT. 47	Biogas Solarpanel IPAL komunal	Mongabay Indonesia, Situs berita lingkungan 14 Desember 2012

Sumber: diolah dari berbagai sumber, DIY, 2015.

Partisipasi masyarakat dalam inovasi kampung hijau dibedakan menjadi dua. Pertama, partisipasi sebagai inisiasator,

kreator dan innovator dalam inovasi kampung hijau yang tergolong sangat tinggi. Hal itu terjadi terutama di desa atau

kalurahan kota yang memiliki kesadaran tinggi akan arti pentingnya kampung hijau. Kondisi ini ditandai oleh munculnya tokoh sebagai public figure yang menjadi pioneer. Tokoh yang sangat menonjol perannya terdapat di Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Namun hal serupa belum ditemukan dalam rekaman data di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kedua adalah golongan partisipasi masyarakat yang masih sangat minimalis, dengan harus dipaksa oleh sistem. Beberapa kampung hijau sulit terbentuk mengingat ketergantungan masyarakat sangat besar kepada pemerintah.

Partisipasi masyarakat di Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta memiliki prestasi yang sangat baik dalam inovasi kampung hijau. Semangat pemerintah diimbangi oleh masyarakat. Peran masyarakat sangat menonjol sehingga dusun Sukunan di Sleman, Serut di Bantul dan RW 08 Gambiran di Kota Yogyakarta menjadi sangat inovatif dalam membangun kampung hijau. Ketiga kampung hijau ini kemudian mendapatkan penghargaan sebagai kampung hijau terbaik. Pada gilirannya ketiganya dewasa ini telah menjadi kampung iklim.

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk pola perilaku good governance dalam pembangunan kampung hijau telah

terbukti. Kampung hijau pertama di Sleman dibangun untuk mewujudkan kondisi kampung yang sehat, dengan partisipasi masyarakat dari sedikit berangsur banyak. Kampung hijau pertama di Bantul dibangun dari kesadaran menghadapi bencana, sehingga terbentuk kekuatan yang lebih solid. Kampung hijau pertama di Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mengurangi dampak banjir secara inovatif telah mewujudkan kondisi yang sangat dramatis. Namun partisipasi yang terjadi di tiga lokasi kabupaten dan kota ini belum berkembang meluas. Terdapat lebih banyak masyarakat yang bersifat pasif dan berharap bantuan pemerintah. Terbukti hingga tahun 2017, tidak banyak bermunculan kampung hijau di tiga wilayah ini. Bahkan di dua kabupaten lainnya, yakni Kulon Progo dan Gunung Kidul juga belum tampak secara menonjol adanya eksistensi kampung hijau.

Peran good governance dari swasta yang dilakukan oleh para pengusaha yang bergerak di lingkungan bisnis organik dapat memberikan bantuan edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang diberikan yaitu berupa penggunaan teknologi namun berhubungan dengan kepentingan. Untuk itulah hubungan yang terjalin tidak langgeng, dikarenakan hanya

sebatas komitmen untuk memenuhi kepentingan saja. Dengan demikian, tanggung jawab secara berkelanjutan tidak dapat dipenuhi sesuai harapan.

Untuk mengoptimalkan good governance yang dilakukan oleh pemerintah, semangat birokrasi yang memiliki keahlian lingkungan, berinovasi dan berpendekatan kerakyatan perlu dikembangkan. Dengan demikian, autentisitas birokrasi hijau (authentic green bureaucracy) dapat terbentuk. Peran good governance swasta akan meningkat jika memiliki program aksi hijau (private green action) secara berkelanjutan. Apabila kepentingan reciprocal terpenuhi secara kelanjutan, maka akan terjadi kerjasama berkelanjutan. Sedangkan partisipasi masyarakat akan berkembang dan mengalami perluasan semangat inovasi kampung hijau dengan melalui rekayasa sosial komunitas hijau (social engineering green community).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil pengkajian terhadap data sekunder menunjukkan bahwa peran pemerintah DIY berada pada tataran regulasi, perencanaan, dan implementasi. Pendampingan telah dilakukan, namun SDM yang terbatas tidak memungkinkan untuk menjangkau wilayah dan masyarakat yang luas. Dari Proses yang terjadi selama satu

dasawarsa hanya menghasilkan inovasi kampung hijau dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas. Partisipasi masyarakat sangat bagus hanya terdapat di wilayah yang memiliki inisiator dan pioneer yang kuat. Sedangkan pada umumnya, masyarakat tidak memberikan dukungan yang kuat. Peran swasta terbatas inovasi dan terkonsentrasi pada hubungan kepentingan. Peran good governance terjadi dengan efektif di tiga kampung hijau. Namun, masyarakat masih dikendalikan oleh harapan akan adanya kucuran bantuan pemerintah.

Rekomendasi untuk mengoptimalkan good governance adalah adanya autentisitas birokrasi hijau (authentic green bureaucracy), program aksi hijau oleh swasta (private green action) dan rekayasa sosial komunitas hijau (social engineering green community).

DAFTAR PUSTAKA

Aminah dan Noviani. (2014). "Analisis penerapan akuntansi lingkungan di rumah sakit Mardi Waluyo Metro. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. 5(2 September 2014) .pp. 1 – 16.

Manan, Rustam Hakim. (2015). "Effective Management of Green Spaces Jakarta City." *International Journal of Engineering Research &*

- Technology (IJERT). 4(Issue 11, November-2015). pp.447-484.
- Gardera, Dida. Lindawati. Esrom Hamonangan. Dewi Ratnaningsih. Jetro Pande Situmorang. Nuke Mutikania. Heru Subroto. Hasan Nurdin. Indira Siregar. Darmanto. dan Wiyoga. (2014). Indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia tahun 2014. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Herlambang, Arie. (2006). "Pencemaran dan strategi penanggulangannya". JAI. 2(1).pp.16-29.
- Ikhtiar, Muhammad. (2016). Analisis Kualitas Lingkungan. Makasar. CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Istarani, Festri. dan Ellina S. Pandebesie. (2014). "Studi dampak arsen (As) dan kadmium (Cd) terhadap penurunan kualitas lingkungan." Jurnal Teknik Pomits. 3(1). pp. 53-58.
- Ives, Christopher. Cathy Oke. Benjamin Cooke. Ascelin Gordon and Associate Professor Sarah Bekessy. (2014). "National Environment Research Program, Environmental Decisions Hub School of Global: Final Report for Australian Government Department of Environment." Urban and Social Studies RMIT University. (October 2014). RMIT University.
- Laporan Statistik Lingkungan Hidup DIY tahun 2015/2016. Yogyakarta.
- Lukman, Agus. (2016) "Dunia Darurat Udara Kotor, 60 Ribu Warga Indonesia Meninggal karena Polusi: Hampir 90 persen kematian akibat polusi udara berada di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah."KBR. (27 September 2016). http://kbr.id/berita/09-2016/who_dunia_darurat_udara_kotor_60_ribu_warga_indonesia_meninggal_karena_polusi/85412.html.
- Mahfud MD, Mohammad. ed2. (2001). Ketika gudang kehabisan teori ekonomi dalam pemerintahan yang bersih. Yogyakarta.UII Press.
- Mohammad Bisri dan Titah Andalan Norman Prastya. (2009). "Imbuhan airtanah buatan untuk mereduksi genangan (studi kasus di kecamatan batu kota batu)." Jurnal Rekayasa Sipil. 3(1). pp.77-91.
- National Geographic Indonesia. (2016). "WHO: 92 Persen Populasi Dunia Bernafas di Udara Tercemar."
- Nugrahaningsih, Widi. dan Indah Wahyu Utami. (2013)."Implementasi good governance dengan dasar UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintah Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017 | 18

- daerah, di kota Surakarta."Seminar nasional dan call for papers uniba 2014eJournal Ilmu Administrasi Negara. 1 (2). Pp.196-209.
- Nugroho, Dwi Suryadi. dan Ernady Syaodih. (t.th.). "Strategi peningkatan kualitas empat atribut green city di kecamatan bandung wetan kota bandung." Jurnal perencanaan wilayah dan kota, 13(2).pp.1-9.
- Pusat Data dan Informasi. (2015). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2014. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Susanto, Diko. Toibah Umi Kalsum. dan Yanolanda Suzantri H. (2014). "Alat penyaringan air kotor menjadi air bersih menggunakan mikrokontroller atmega 32." Jurnal media infotama.10 (2 September 2014). pp. 142-150.
- Toha, Miftah. 1999) "Transparansi dan pertanggung jawaban publik terhadap tindakan pemerintah." Seminar hukum nasional ke-7. Jakarta.
- Wolch, Jennifer R. Jason Byrne . Joshua P. Newell. (2014). "Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'." *Landscape and Urban Planning* 125 (2014).pp. 234–244.
- Woods, Ngaire, (1999). "Good Governance in International Organization." EBSCOhost: Global Governance . (5. Jan-Mar 1999).
- Yenny. (2013). Prinsip-prinsip good governance: studi tentang penerapan prinsip – prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor camat Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Malek, Nurhayati Abdul. Manohar Mariapan. Mustafa Kamal Mohd Shariff. and Azlizam Aziz.(2010). Assessing the Quality of Green Open Spaces: A review.
<http://www.hphpcentral.com/wp-content/uploads/2010/09/5000-paper-by-Abdul-Malek.pdf>
- Lestan, Katarina Ana. Ivan Eržen. and Mojca Golobi. (2014). "The role of open space in urban neighbourhoods for health-related lifestyle." *International journal of environmental research and public health*. 11. pp. 6547-6570.
- Putri, Chyntia D. Lely Indah Mindarti. Farida Nurani. (2013). "Peran pemerintah daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau dengan perspektif good environmental governance Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017 | 19

- (studi di kota Madiun).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.1(3). pp. 42-50.
- Nikolaïdou, Sofia. Tanja Klöti. Simone Tappert. and Matthias Drilling. “Urban Gardening and Green Space Governance: Towards New Collaborative Planning Practices.” *Urban Planning*. 2016. 1(Issue 1). pp. 5-19.
- Tahir, Muchlas M. dan Zulfan Nahrudin. (2017). “Kapabilitas dynamic governance dalam optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau di kota makassar.” *Cosmogov*.3(1 April 2017).pp.1-13.
- Slamet, Margono. (1985). *Pengantar Sosilogi*. Jakarta. PT Rajawali.
- Susanto, Astrid S. (1979). *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung. Bina Cipta.